

HOME > Sejarah Singkat Apkasi

Sejarah Singkat Apkasi



**SEJARAH SINGKAT
APKASI**
ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN
SELURUH INDONESIA

Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 telah merubah tatanan pemerintahan di Indonesia dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah.

Keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah akan sangat menentukan perjalanan bangsa dan negara di masa mendatang.

Dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah kabupaten seluruh Indonesia membuat wadah kerjasama pemerintah kabupaten dengan nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Pendeklarasian dilakukan pada tanggal 30 Mei 2000 oleh 26 bupati yang mewakili 26 provinsi pada waktu itu.



APKASI
ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN
SELURUH INDONESIA



Bimbingan Teknis dan Studi Tiru
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS LINGKUNGAN DAN CIRCULAR ECONOMY
Selasa - Jumat | 06-09 Agustus 2024
Kabupaten Banyumas - Jawa Tengah

Kata Bimbingan Teknis:
Adean Purandari Ningsi & Conventina Cusani
Kabupaten Banyumas - Jawa Tengah

Studi Tiru:
YFOT - Ikon 798.822, Kabupaten Banyumas - Jawa Tengah

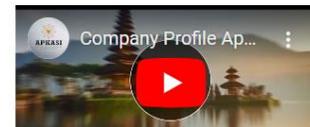
Contact Person:
Sidi, Foneks 0851.5529.9913 Sidi, Foneks 0813.8766.8400

[www.apkasi.org](#)

COMPANY PROFILE APKASI (ID VERSION)



COMPANY PROFILE (ENGLISH VERSION)



SPEAK TO US!!

Mulai Ngobrol

PADA HARI INI, SELASA, TANGGAL TIGAPULUH BULAN MEI TAHUN DUA RIBU (30 MEI 2000) BERTEMPAT DI JAKARTA, KAMI BUPATI SELURUH INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN:

1. BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, KAMI SEPAKAT BERHIMPUN UNTUK MEMBENTUK ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SEBAGAI WADAH KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA
2. BAHWA SEBAGAI KONSEKWENSI LOGIS DARI PEMBENTUKAN ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMI SEPAKAT UNTUK MENAATI SEMUA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

JAKARTA, 30 MEI 2000
PERWAKILAN BUPATI SELURUH INDONESIA

Mengetahui,
Menteri Negara Otonomi Daerah
Selaku Wakil Ketua DPOD

Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, M.A



VISI dan MISI

KEANGGOTAAN

Anggota APKASI adalah Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia berdasarkan tingkat provinsi yang diwakili oleh Bupati.

VISI

Terwujudnya penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab guna mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

Menciptakan kerjasama yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antar Anggota APKASI dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menciptakan hubungan yang serasi antara anggota APKASI dengan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah secara proporsional sesuai dengan strata Pemerintahan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meningkatkan kemampuan Anggota APKASI dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).

TUGAS POKOK

Memfasilitasi kepentingan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui peran advokasi, mediasi dan fasilitasi dengan lembaga Pemerintah serta non Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI

Menjadi mitra kritis dan strategis Pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional tentang Pemerintahan Daerah.

Menjadi fasilitator dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Daerah kepada Pemerintah.

Memfasilitasi kerjasama antar Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Daerah serta kerjasama Daerah dalam rangka pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya Daerah.

Memfasilitasi terlaksananya pertukaran ide, informasi dan pengalaman antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendorong promosi Potensi Daerah untuk meningkatkan pencitraan Daerah dalam rangka menghadapi persaingan di tingkat global.

Asosiasi dapat bermitra dengan Pemerintah dalam rangka sosialisasi dan sosialisasi berbagai peraturan, perundang-undangan dan kebijakan di bidang Otonomi Daerah.

SPEAK TO US!!

Mulai Ngobrol